

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT PENGELUARAN

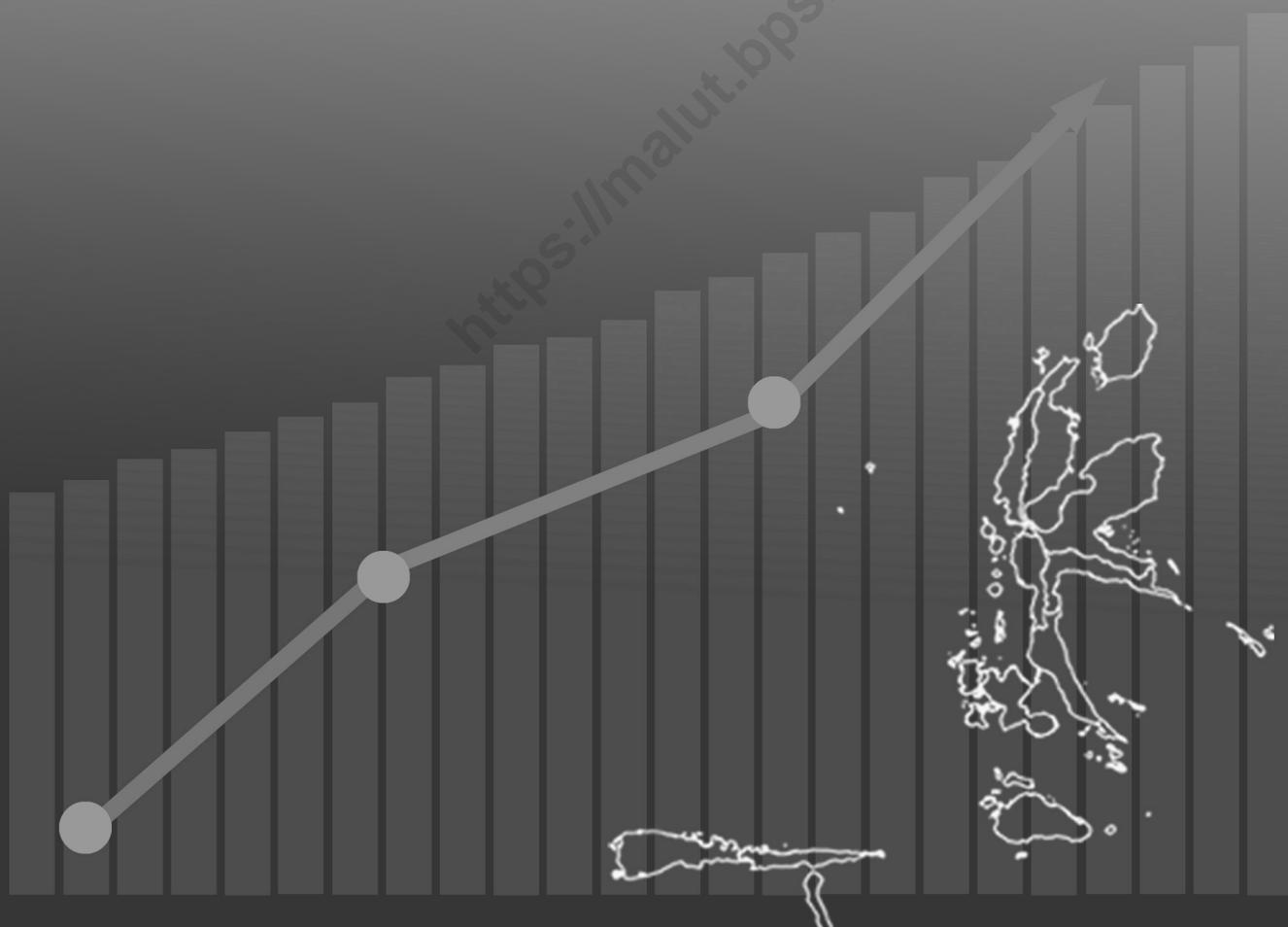
## 2014 - 2018





# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT PENGELUARAN

## 2014 - 2018



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
PROVINSI MALUKU UTARA  
MENURUT PENGELUARAN 2014- 2018**

ISSN : 2460-7487  
Nomor Publikasi : 82550. 1904  
Katalog BPS : 9302020.82

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : xii + 44 halaman

Naskah:  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:  
©Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dicetak Oleh:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
PROVINSI MALUKU UTARA  
MENURUT PENGELUARAN 2014- 2018**

Tim Penyusun:

Penanggungjawab Umum :  
Drs. Misfaruddin, M.Si

Penyunting :  
Achmad Sobari, SST, SE, M.Si  
Bayu Suseno, SST, M.Si

Penulis :  
Juniyati, SE

Pengolah data :  
Juniyati, SE

Gambar Kulit :  
Juniyati, SE

<https://malut.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Net Ekspor Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh PBB.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Ternate, Juli 2019

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

KEPALA



Drs. Misfaruddin, M.Si



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
PENJELASAN TEKNIS .....	xi
<b>BAB I PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>3</b>
1.1 Pengertian PDRB.....	3
1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto.....	4
1.3 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	5
<b>BAB II METODE PENDEKATAN DAN SUMBER DATA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT).....	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT).....	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P).....	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	15
2.5 Perubahan Inventori (PI) .....	17
2.6 Ekspor dan Impor.....	18
<b>BAB III TINJAUAN EKONOMI MALUKU UTARA.....</b>	<b>23</b>
3.1 Struktur ekonomi.....	23
3.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	24
3.3 PDRB Per Kapita .....	25

<b>BAB IV PERTUMBUHAN DAN PERANAN PDRB MALUKU UTARA MENURUT PENGELUARAN .....</b>	<b>29</b>
4.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	29
4.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga .....	30
4.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	30
4.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	31
4.5 Perubahan Inventori .....	31
4.6 Ekspor Luar Negeri .....	32
4.7 Impor Luar Negeri .....	32
4.8 Net Ekspor Antar Daerah .....	33

**LAMPIRAN**

<https://malut.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### BAB I PENJELASAN UMUM

Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010 .....	7
--	---

### BAB II METODE PENDUGAAN DAN SUMBER DATA

### BAB III TINJAUAN EKONOMI MALUKU UTARA

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 2014-2018 (%) .....	23
Gambar 3.2 Struktur Ekonomi Maluku Utara 2014-2018 (%) .....	23
Gambar 3.3 PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku Maluku Utara 2014-2018 (Juta Rupiah).....	25

### BAB IV PERTUMBUHAN DAN PERANAN PDRB MALUKU UTARA MENURUT PENGELUARAN

Gambar 4.1 Peranan Setiap Komponen terhadap Perekonomian Maluku Utara 2018 (%) .....	29
Gambar 4.2 Peranan Subkomponen PK-RT terhadap Perekonomian Maluku Utara 2018 (%) .....	29
Gambar 4.3 Peranan Subkomponen PK-LNPRT terhadap Perekonomian Maluku Utara 2018 (%) .....	30
Gambar 4.4 Petumbuhan Komponen PK-P 2014-2018 (%) .....	30
Gambar 4.5 Petumbuhan Komponen PMTB 2014-2018 (%).....	31
Gambar 4.6 Petumbuhan Komponen Perubahan Inventori 2014-2018 ADHB (Miliar Rupiah).....	31
Gambar 4.7 Pertumbuhan Komponen Ekspor Luar Negeri 2014-2018 (%) .....	32
Gambar 4.8 Perkembangan Peranan Komponen Ekspor LN 2014-2018 (%) .....	32
Gambar 4.9 Pertumbuhan Komponen Impor Luar Negeri 2014-2018 (%) .....	33
Gambar 4.10 Pertumbuhan Komponen Net Ekspor Antar Daerah 2014-2018 (%)	33

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PDRB Maluku Utara Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran 2014 - 2018 (Miliar Rupiah) .....	37
Lampiran 2 PDRB Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran 2014 - 2018 (Miliar Rupiah) .....	38
Lampiran 3 Laju Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran 2014 - 2018 (%) .....	39
Lampiran 4 Indeks Implisit PDRB Maluku Utara menurut Pengeluaran 2014 - 2018 ..	40
Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Maluku Utara menurut Pengeluaran 2014 - 2018 (%) .....	41
Lampiran 6 Sumber Pertumbuhan PDRB Maluku Utara menurut Pengeluaran 2014 - 2018(%) .....	42
Lampiran 7 Peranan Komponen PDRB Maluku Utara menurut Pengeluaran 2014 - 2018(%) .....	43

<https://malut.kps.go.id>

## PENJELASAN TEKNIS

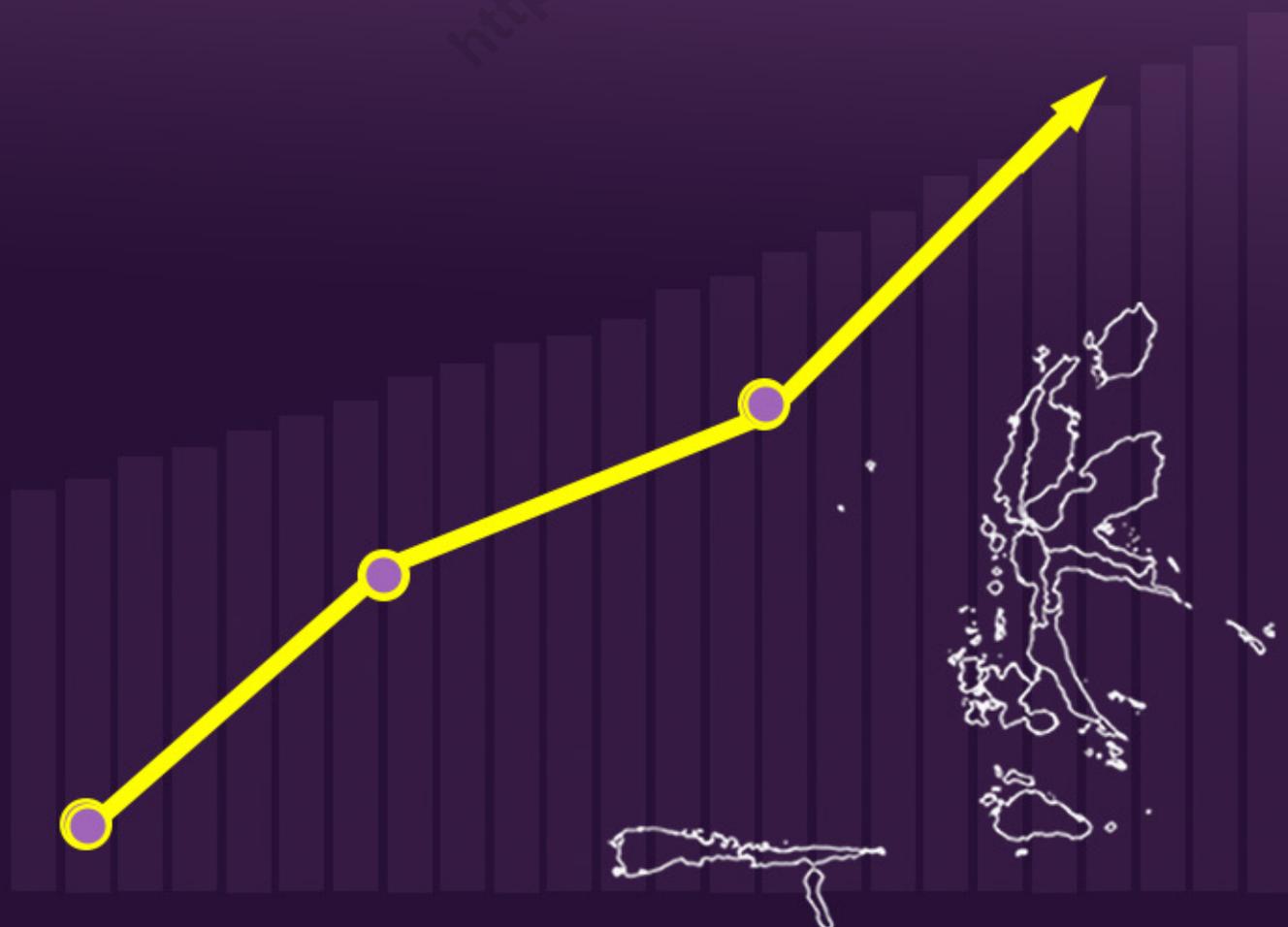
1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai "Sistem Neraca Nasional". Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen pengeluarannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut pengeluaran dirinci menurut total pengeluaran yang mencakup komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT); Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT); Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P); Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Perubahan Inventori (PI); Ekspor dan Impor Luar Negeri; dan Ekspor Netto Antar Daerah (Ekspor Antar Daerah dikurangi Impor Antar Daerah).
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
6. Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
7. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.
8. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.



# 1

## PENJELASAN UMUM

<https://malut.bps.go.id>





# BAB I

## PENJELASAN UMUM

### 1.1 Pengertian PDRB

PDRB menurut pengeluaran merupakan salah satu pendekatan dalam penghitungan PDRB yaitu ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB menurut Pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah dan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi baik domestik maupun dari luar wilayah.

Penghitungan PDRB menurut pengeluaran tidak terlepas dari penghitungan PDRB menurut lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB menurut pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. PDRB menurut pengeluaran juga menampilkan keterkaitan antara aktivitas pengeluaran dengan penyediaan barang dan jasa baik yang berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep<sup>2</sup> penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua

pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan pendugaan dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih/diskrepansi statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB menurut Pengeluaran menjelaskan besaran nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut. Konsumsi akhir yang dimaksud terdiri atas komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), dan Ekspor barang dan jasa.

Dalam menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi konsumsi akhir masyarakat, tidak terlepas dari barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah atau disebut juga dengan impor. Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat juga terdapat produk impor. Sehingga dalam mengukur besaran PDRB, komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi akhir. Tingginya konsumsi tidak selalu mampu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi kesempatan bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa perdagangan produk impor cenderung tumbuh baik secara kuantitas, nilai, maupun jenisnya.

Secara konsep, nilai PDRB menurut lapangan usaha sama besar dengan PDRB menurut pengeluaran. Namun dalam pendekatan pengukuran antara keduanya berbeda sehingga menghasilkan perbedaan. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

<sup>2</sup> *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

ini diletakkan pada sisi PDRB menurut Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk melakukan pendugaan. Melalui penjelasan ini, semoga pengguna data PDRB dapat menerima adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Nilai yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesian sebagai berikut :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (Income) = PDRB Produksi

C (Consumption) = Konsumsi akhir

GFCF (Gross Fixed Capital Formation) = Pembentukan Modal Tetap Bruto

$\Delta$  Inventori = Perubahan Inventori

X = Ekspor

M = Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB menurut lapangan usaha akan "identik" dengan PDRB menurut pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional. Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

Sebagaimana PDRB menurut lapangan usaha, dari PDRB menurut

pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

## 1.2 Kegunaan PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap komponen dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap komponen pengeluaran dalam suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara

### 1.3 Perubahan Tahun Dasar PDRB

#### Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari System of National Accounts (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (benchmark) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

#### Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta

aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

#### Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas PDRB;
- Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

#### Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Perubahan input data untuk keperluan pemodelan dan peramalan.

#### Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun ;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

#### Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan

nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan databases, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari

**Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010**

PDRB Tahun Dasar 2000		PDRB Tahun Dasar 2010	
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1.	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4.	Perubahan Inventori	4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto
5.	Ekspor	5.	Perubahan Inventori
6.	Impor	6.	Ekspor
		7.	Impor

output industri yang melakukannya dan PMTB.

*Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode *Financial intermediation services indirectly measured* (FISIM). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge* (IBSC).

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

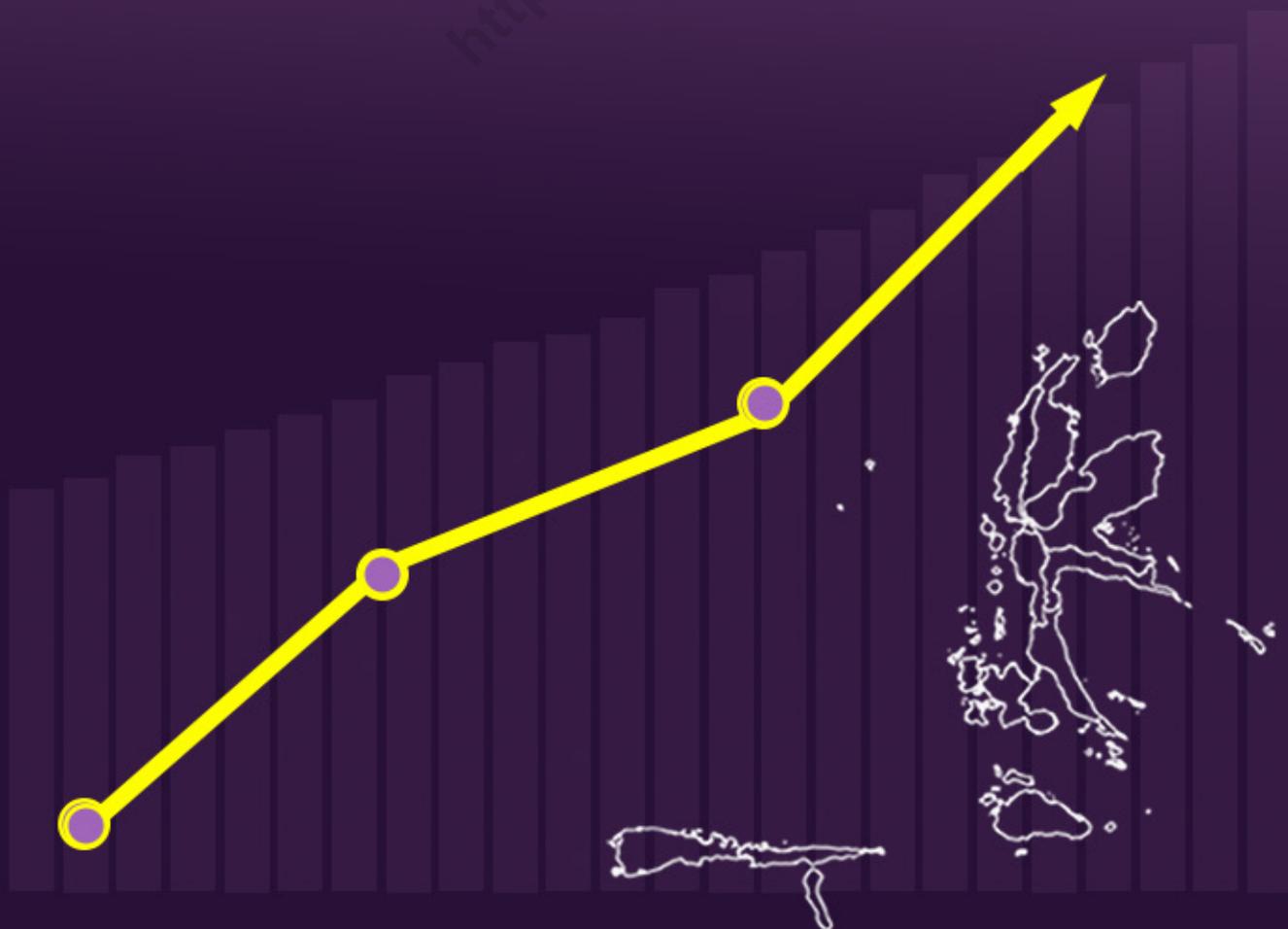
Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product*



# 2

## METODE PENDUGAAN DAN SUMBER DATA

<https://malut.bps.go.id>





## BAB II METODE PENDUGAAN DAN SUMBER DATA

PDRB menurut pengeluaran terdiri atas delapan komponen, yaitu komponen Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, Pembentukan modal tetap bruto, Perubahan inventori, Ekspor luar negeri, Impor luar negeri, dan Net ekspor antar daerah. Penjelasan mengenai ruang lingkup dan metode penghitungan setiap komponen adalah sebagai berikut :

### 2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

#### 2.1.1 Pendahuluan

Unit institusi dalam suatu perekonomian dapat dikelompokkan ke dalam lima sektor yaitu, korporasi finansial, korporasi non-finansial, pemerintahan umum, rumah tangga dan LNPRT. Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

#### 2.1.2 Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan

tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

#### 2.1.3 Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Barang dan jasa yang dikonsumsi, dalam bentuk:

- makanan dan minuman baik bahan maupun makanan jadi, termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- jasa-jasa, seperti kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, dan ongkos pembantu rumah tangga;
- barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;

- barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen luar wilayah atau luar negeri termasuk dalam konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai impor. Sedangkan pembelian langsung oleh nonresiden diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak diduplikasi (tidak diproduksi kembali), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri.

Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Demikian halnya pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dapat diklasifikasi ke dalam 12 (dua belas) COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*), yaitu:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki

4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

#### 2.1.4 Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

#### 2.1.5 Metode Pendugaan

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa

komoditas dikontrol secara tersendiri;

4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

## **2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)**

### **2.2.1 Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### **2.2.2 Konsep dan Definisi**

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### **2.2.3 Cakupan**

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

### **2.2.4 Sumber Data**

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *updating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

### 2.2.5 Metode Pendugaan

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

## 2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

### 2.3.1 Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk

mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

### 2.3.2 Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh

biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

### 2.3.3 Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P provinsi mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi; b). PK-P kabupaten/kota ada di wilayah provinsi; c). PK-P provinsi yang bersangkutan; d). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P provinsi.

### 2.3.4 Sumber data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Tahunan adalah data realisasi APBN Tahunan, realisasi APBD Tahunan, APBD Kabupaten/Kota Tahunan yang berasal dari Kementerian Keuangan serta Data Keuangan Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari. Sebagai pendukung, digunakan data tentang upah dan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Indeks Harga dari BPS.

### 2.3.5 Metode Pendugaan

#### a. PK-P Atas Dasar Harga Berlaku

Secara umum, di dalam menghitung PK-P adh Berlaku digunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social Transfer in-kind} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Untuk tingkat provinsi, PK-P atas dasar harga berlaku, dihitung berdasarkan

penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota atas dasar harga berlaku, dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri dengan seluruh desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota ditambah pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan dan pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan).

#### b. PK-P Atas Dasar Harga Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

## 2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

### 2.4.1 Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut

jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

#### 2.4.2 Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/ CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

#### 2.4.3 Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property*

*products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

#### 2.4.4 Sumber data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

#### 2.4.5 Metode Pendugaan

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$\text{PMTB\_ADHK} = \text{PMTB\_ADHB} / \text{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Suplai : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

## 2.5 Perubahan Inventori (PI)

### 2.5.1 Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### 2.5.2 Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

### 2.5.3 Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

#### 2.5.4 Sumber Data

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/ BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;

6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

#### 2.5.5 Metode Pendugaan

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

##### a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku =  $\frac{\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}}{\text{Harga per unit}}$

PI atas dasar harga Konstan =  $\frac{\text{PI atas dasar harga Berlaku}}{\text{IHPB}}$

##### b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan =  $\frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}}{\text{IHPB (t-1)}}$

PI atas dasar harga Berlaku =  $\frac{\text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}}{\text{IHPB (t)}}$

## 2.6 Ekspor dan Impor

### 2.6.1 Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor provinsi terjadi baik di luar negeri maupun antar daerah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi, sebaran produksi yang tidak merata, serta disparitas harga, menjadi faktor utama

munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa lebih dari kebutuhan domestik, juga terdorong memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, jumlah penduduk yang semakin banyak diiringi oleh aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa yang semakin meningkat dan beragam. Kemajuan bidang transportasi dan komunikasi juga ikut memperlancar distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut mendorong aktivitas ekspor-impor di Kabupaten/kota semakin berkembang.

Secara umum, aktivitas ekspor-impor antar daerah lebih mudah dilakukan dibanding dengan aktivitas ekspor-impor nasional ke luar negeri. Hal ini terjadi antara lain karena :

- transaksi ekspor dan impor antar daerah tidak memerlukan izin dan tidak dikenai tarif impor ataupun pajak ekspor;
- jarak antar daerah relatif lebih dekat; dan
- faktor selera masyarakat relatif sama.

Dilihat dari sisi partner transaksi, ekspor-impor provinsi dapat dilakukan dengan provinsi lain (ekspor-impor antar daerah) atau negara lain (ekspor-impor luar negeri). Kondisi ini membuat transaksi ekspor-impor provinsi berperan besar dalam pembentukan PDRB. Peran ekspor-impor provinsi terhadap PDRB diyakini melebihi peran ekspor-impor nasional terhadap PDB. Peranan ekspor-impor provinsi juga diyakini relatif besar dibandingkan peran komponen lain dalam membentuk PDRB provinsi.

### 2.6.2 Konsep dan Definisi

Ekspor-impor provinsi didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik

penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen provinsi dengan non-residen yang berada di luar provinsi baik Indonesia maupun luar negeri (United Nations, 2009: 56).

### 2.6.3 Cakupan

Cakupan transaksi ekspor-impor provinsi sama dengan cakupan transaksi ekspor-impor nasional ke luar negeri, yang membedakan hanya mitra transaksinya. Dalam ekspor-impor nasional ke luar negeri, yang menjadi mitra adalah residen luar negeri, sedangkan ekspor-impor provinsi yang menjadi mitra adalah residen provinsi lain di Indonesia dan residen luar negeri.

### 2.6.4 Sumber data

Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor nasional, penghitungan ekspor impor provinsi belum tersedia data dasar yang sesuai dengan konsep SNA. Data yang tersedia hanya menunjukkan adanya transaksi, namun tidak diketahui berapa besar nilainya. Kondisi data ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor provinsi sulit dilakukan secara langsung. Pada deret data PDB/PDRB series 2000=100, sumber data yang tersedia dan digunakan untuk penyusunan ekspor-impor luar negeri dan antar daerah di tingkat provinsi adalah:

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang

keluar-masuk provinsi dari hasil survei.

- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

100,00; sedangkan periode lain digerakkan dengan perubahan indeks yang ada.

### 2.6.5 Metode Pendugaan

Metode pendugaan ekspor-impor provinsi terdiri dari penghitungan untuk atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

#### a. Penghitungan Ekspor/Impor atas Dasar Harga Berlaku

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar daerah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

#### b. Penghitungan Ekspor/Impor Atas Dasar Harga Konstan

Penghitungan ekspor-impor atas dasar harga konstan dilakukan dengan metode deflasi, dengan IHPB dan IHK sebagai deflator-nya. Karena indeks harga sebagai deflator tidak menggunakan tahun dasar 2010, maka sebelum digunakan, tahun dasar indeks harga tersebut harus digeser terlebih dahulu menjadi tahun 2010. Metode yang digunakan adalah yang dikenal dengan istilah referencing, yaitu nilai indeks pada tahun 2010 digeser menjadi

# 3

## TINJAUAN EKONOMI MALUKU UTARA

<https://malut.bps.go.id>





### BAB III

## TINJAUAN EKONOMI MALUKU UTARA

Secara umum perekonomian Maluku Utara pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Kondisi ini tak lepas dari tumbuhnya sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel di Maluku Utara yang mendorong pertumbuhan ekspor. Pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan Maluku Utara pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, mencapai 7,92 persen.

**Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 2014-2018 (%)**



Nilai PDRB Maluku Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 36,50 triliun rupiah. Secara nominal PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4,23 triliun rupiah dari tahun 2017. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu peningkatan nilai kuantitas dan kenaikan harga (inflasi).

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan, yaitu dari 23,21 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 25,05 triliun rupiah pada tahun 2018. Kenaikan ini menunjukkan bahwa selama tahun 2018 Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7,92 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi

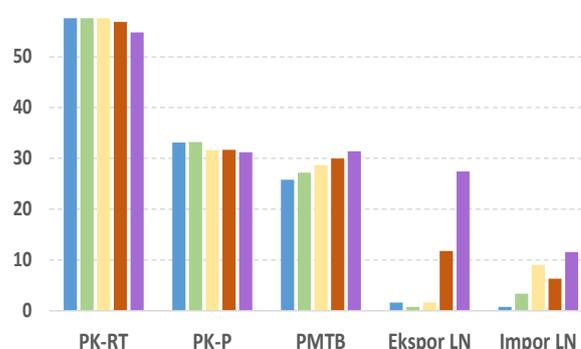
Maluku Utara pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan PDRB ADHK ini hanya disebabkan oleh peningkatan kuantitas saja dan tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga.

### 3.1 Struktur ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui besarnya peranan masing-masing komponen terhadap total PDRB. Struktur ini memberikan informasi penting tentang komponen penopang utama perekonomian di suatu wilayah dari sisi pengeluaran. Penyajian struktur ekonomi dari waktu ke waktu dapat menunjukkan ada tidaknya perubahan struktur perekonomian di suatu wilayah.

Selama lima tahun terakhir (2014-2018), struktur perekonomian Maluku Utara didominasi oleh tiga komponen pengeluaran, yaitu: Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, dan Pembentukan modal tetap bruto seperti terlihat pada Gambar 3.2. Pada tahun 2018, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Maluku Utara dihasilkan oleh komponen Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga yang mencapai sebesar 54,79 persen. Selanjutnya komponen Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sebesar 31,22 persen, dan komponen Pembentukan modal tetap bruto sebesar 31,39 persen.

**Gambar 3.2 Struktur Ekonomi Maluku Utara 2014-2018 (%)**



Meskipun selama kurun waktu lima tahun komponen Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Maluku Utara, namun besaran nilai kontribusinya mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Komponen Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 58,05 persen dan pada tahun 2018 menurun menjadi 54,79 persen. Berbeda dengan komponen Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, komponen Pembentukan modal tetap bruto menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian Maluku Utara dalam lima tahun terakhir. Peningkatan kontribusi komponen PMTB didorong oleh peningkatan investasi fisik di sektor industri pengolahan barang tambang.

Komponen ekspor luar negeri yang pada tahun 2017 mulai memberikan peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Maluku Utara, semakin meningkat peranannya pada tahun 2018 (mencapai 27,45 persen) yang didorong oleh peningkatan ekspor feronikel seiring dengan mulai beroperasinya smelter nikel di Provinsi Maluku Utara.

### 3.3 Petumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang menunjukkan kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran dapat dipandang sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang digunakan oleh semua unit institusi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Maluku Utara pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan. Nilai PDRB Maluku Utara tahun 2018 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 25,05 triliun rupiah atau meningkat 1,84 triliun

rupiah dari tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara sebesar 7,92 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, perekonomian Provinsi Maluku Utara tumbuh fluktuatif berkisar antara 5 hingga 8 persen, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2018 yaitu 7,92 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun 2018 disebabkan karena tumbuhnya sektor industri pengolahan barang tambang yang mendorong pertumbuhan ekspor luar negeri.

Pada tahun 2014 perekonomian Provinsi Maluku Utara tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya yaitu 5,49 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh resesi komponen ekspor luar negeri di Maluku Utara seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk mengolah hasil tambangnya di dalam negeri sebelum diekspor.

Pada tahun 2015 perekonomian Maluku Utara kembali menguat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,09 persen. Kemudian mengalami perlambatan ekonomi pada tahun 2016 dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,77 persen. Perlambatan ini diantaranya disebabkan oleh melambatnya beberapa komponen diantaranya melambatnya komponen Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dan Pembentukan modal tetap bruto sebagai dampak adanya penghematan anggaran pemerintah yang menyebabkan melambatnya belanja modal pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh komponen Ekspor luar negeri yaitu mencapai 114,10 persen. Pertumbuhan komponen Ekspor luar negeri didorong oleh peningkatan ekspor feronikel seiring dengan mulai beroperasinya smelter

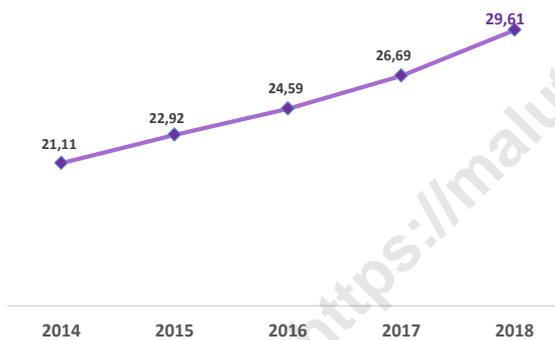
nikel di Provinsi Maluku Utara.

Dari 8 komponen pengeluaran, sebagian besar mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri yang mencapai 114,10 persen.

### 3.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator penting untuk melihat tingkat produktivitas ekonomi di suatu wilayah adalah nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

**Gambar 3.3 PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku Maluku Utara 2014-2018 (Juta Rupiah)**



Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Maluku Utara sejak tahun 2014 hingga 2018 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 21,11 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 29,61 juta rupiah yang ditunjukkan pada Gambar 3.3.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2014-2018, PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 juga terus mengalami peningkatan. Nilai

PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar 16,87 juta rupiah pada tahun 2014 meningkat hingga mencapai 20,32 juta rupiah pada tahun 2018. Sehingga rata-rata pertumbuhan per tahun atas dasar harga konstan selama periode tersebut adalah sebesar 4,47 persen.



# 4

## PERTUMBUHAN DAN PERANAN PDRB MALUKU UTARA MENURUT PENGELUARAN

<https://malut.bps.go.id>





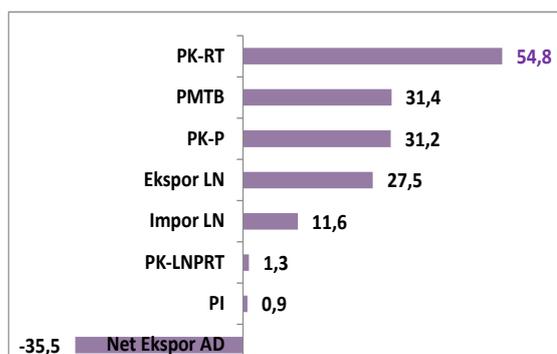
## BAB IV PERTUMBUHAN DAN PERANAN PDRB MALUKU UTARA MENURUT PENGELUARAN

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku Utara menurut pengeluaran terdiri atas delapan komponen pengeluaran yang di dalamnya terbagi lagi menjadi beberapa subkomponen. Uraian berikut akan membahas setiap komponen pengeluaran di Maluku Utara secara lebih rinci.

### 4.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

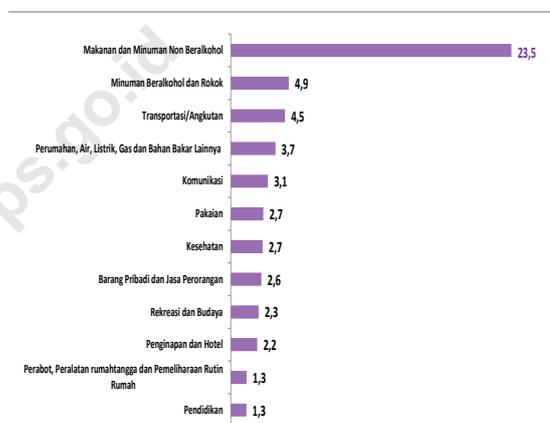
Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komponen PK-RT merupakan penggerak dominan di dalam perekonomian Maluku Utara. Seperti ditunjukkan pada gambar 4.1 peranan komponen ini pada tahun 2018 mencapai 54,79 persen atau secara nominal sebesar 20,00 triliun rupiah. Komponen PK-RT pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 4,38 persen. Pertumbuhan komponen PK-RT pada tahun 2018 sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 5,11 persen.

**Gambar 4.1 Peranan Setiap Komponen terhadap Perekonomian Maluku Utara 2018 (%)**



Penghitungan komponen PK-RT pada tingkat provinsi dapat dirinci menjadi 12 subkomponen, yaitu subkomponen Makanan dan Minuman Non Beralkohol; Minuman Beralkohol dan Rokok; Pakaian; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya; Perabot, Peralatan Rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah; Kesehatan; Transportasi/Angkutan; Komunikasi; Rekreasi dan Budaya; Pendidikan; Restoran dan Hotel; dan Barang Pribadi dan Jasa Perorangan.

**Gambar 4.2 Peranan Subkomponen PK-RT terhadap Perekonomian Maluku Utara 2018 (%)**



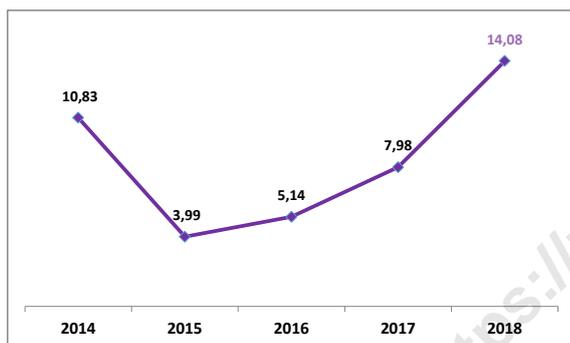
Subkomponen Makanan dan Minuman Non Beralkohol merupakan subkomponen yang memberikan peranan terbesar di dalam komponen PK-RT dan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk. Kontribusi subkomponen ini pada tahun 2018 mencapai 23,46 persen terhadap total PDRB Maluku Utara, atau secara nominal atas dasar harga berlaku sebesar 8,56 triliun rupiah. Subkomponen lainnya memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil, yaitu di bawah 10 persen.

Melihat pada laju pertumbuhan ekonomi, subkomponen di dalam PK-RT yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya mencapai 9,85 persen sedangkan subkomponen Makanan dan Minuman Non Beralkohol tumbuh sebesar 3,13 persen.

#### 4.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

Jika pada tahun lalu Komponen PK-LNPRT merupakan komponen yang memberikan sumbangan terkecil terhadap perekonomian Maluku Utara, pada tahun 2018 ini sumbangan PK-LNPRT sedikit mengalami kenaikan yaitu dari 1,19 persen pada tahun 2017 menjadi 1,26 persen pada tahun 2018, lebih tinggi dari komponen Perubahan Inventori. Pada tahun 2018 komponen ini mampu tumbuh mencapai 14,08 persen dan memberikan sumber pertumbuhan 0,17 persen pada total pertumbuhan perekonomian Maluku Utara.

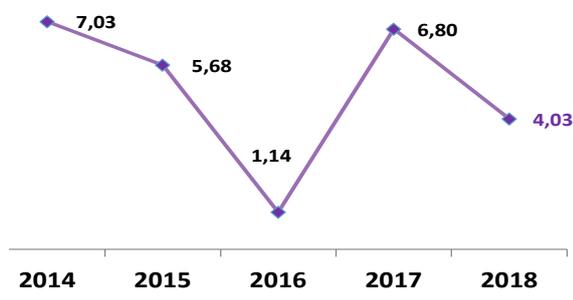
**Gambar 4.3 Pertumbuhan Komponen PK-LNPRT 2014 - 2018 (%)**



#### 4.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

Komponen PK-P merupakan pengeluaran konsumsi yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan. Termasuk di dalam komponen ini adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, penerimaan retribusi dan penyusutan barang modal. Komponen PK-P memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Maluku Utara. Hal ini terlihat pada kontribusi komponen ini pada tahun 2018 yang mencapai 31,22 persen terhadap perekonomian Maluku Utara yang merupakan kontribusi terbesar ketiga setelah komponen PK-RT dan PMTB.

**Gambar 4.4 Pertumbuhan Komponen PK-P 2014 - 2018 (%)**



Atau dengan kata lain, komponen PK-P merupakan penggerak penting di dalam perekonomian Maluku Utara. Komponen PK-P pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4,03 persen, melambat dibandingkan tahun 2017 sebesar 6,80 persen.

Penghitungan komponen PK-P pada tingkat provinsi dapat dirinci menjadi dua subkomponen, yaitu subkomponen Konsumsi Kolektif dan Konsumsi Individu. Konsumsi Kolektif merupakan subkomponen PK-P yang tidak ditujukan kepada individu khusus tertentu, atau dengan kata lain manfaat dari konsumsi ini dapat dirasakan oleh banyak individu. Termasuk di dalam Konsumsi Kolektif adalah sebagian besar pengeluaran konsumsi Pemerintah pada bidang politik, keamanan, ekonomi, agama, dll. Sedangkan subkomponen Konsumsi Individu merupakan subkomponen PK-P yang ditujukan kepada individu khusus tertentu. Bidang yang termasuk di dalam subkomponen ini antara lain pengeluaran konsumsi akhir pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, dll.

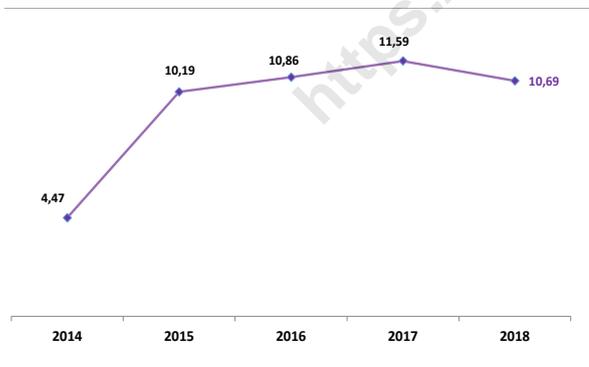
Subkomponen Konsumsi Kolektif mampu memberikan peranan yang lebih besar dibandingkan Konsumsi Individu. Pada tahun 2018, peranan konsumsi kolektif mencapai 22,28 persen dan peranan konsumsi individu sebesar 8,95 persen. Dilihat dari laju pertumbuhan, subkomponen Konsumsi Individu mampu melaju mencapai 7,04 persen pada tahun 2018, lebih tinggi dibandingkan Konsumsi

Kolektif yang sebesar 2,88 persen. Namun, pertumbuhan subkomponen Konsumsi Individu ini melambat dibandingkan tahun 2016 dan 2017 yang mampu mencapai 26,12 persen dan 14,98 persen.

#### 4.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen PMTB merupakan komponen yang disebut juga sebagai investasi fisik di dalam PDRB. Komponen ini menunjukkan penambahan dan pengurangan aset tetap yang dimiliki institusi ekonomi (rumah tangga, pemerintah, korporasi, dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga). Semakin besar nilai komponen PMTB menunjukkan bahwa investasi fisik di suatu wilayah juga semakin besar. Pembentukan Modal Tetap Bruto yang besar sangat dibutuhkan oleh Maluku Utara, yang merupakan salah satu provinsi muda di Indonesia, untuk dapat mengejar kesenjangan pembangunan dari provinsi lainnya.

**Gambar 4.5** Pertumbuhan Komponen PMTB 2014 - 2018 (%)



Peranan komponen PMTB terhadap perekonomian Maluku Utara sangat penting. Hal ini terlihat dari kontribusi komponen ini yang mencapai 31,39 persen atau merupakan kontribusi terbesar kedua dengan nilai atas dasar harga berlaku mencapai 11,45 triliun rupiah. Dilihat dari laju pertumbuhan, komponen PMTB mampu melaju mencapai 10,69 persen.

Penghitungan komponen PMTB pada tingkat provinsi dapat dirinci menjadi dua subkomponen, yaitu subkomponen Bangunan dan Non Bangunan. Subkomponen Bangunan merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada jenis bangunan baik bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, maupun bangunan lainnya. Termasuk juga dalam Subkomponen bangunan antara lain jalan, jembatan, waduk, pelabuhan, dll. Subkomponen Non Bangunan merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada jenis Non Bangunan. Yang termasuk ke dalam Subkomponen Non Bangunan antara lain mesin, kendaraan, hewan dan tanaman yang menghasilkan berulang, produk kekayaan intelektual, dan lainnya.

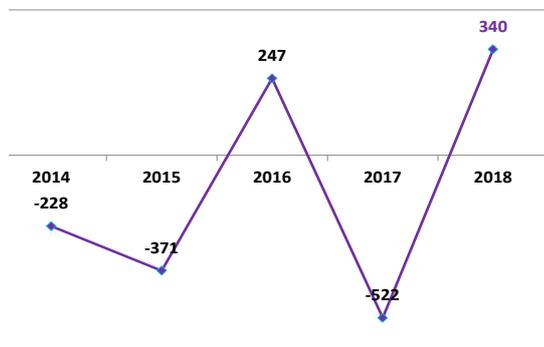
Peranan kedua subkomponen terhadap perekonomian Maluku Utara pada tahun 2018 hampir seimbang, yaitu sebesar 16,11 persen (Bangunan) dan 15,28 persen (Non Bangunan). Dilihat dari laju pertumbuhan, subkomponen Bangunan tumbuh mencapai 12,75 persen lebih cepat dibandingkan subkomponen Non Bangunan yang tumbuh sebesar 8,24 persen. Kondisi ini didorong oleh proses pembangunan smelter nikel di Provinsi Maluku Utara.

#### 4.5 Perubahan Inventori

Komponen Perubahan Inventori merupakan nilai yang menunjukkan *flow* dari persediaan. Nilai dari komponen ini bisa bernilai positif yang menunjukkan penambahan persediaan dan bisa juga bernilai negatif yang menunjukkan pengurangan persediaan. Termasuk ke dalam barang inventori adalah bahan baku dan penolong, barang jadi, barang untuk dijual kembali, *work in progress*, dan lainnya.

Komponen Perubahan Inventori pada tahun 2018 memberikan peranan yang cukup kecil terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu hanya sebesar 0,93 persen.

**Gambar 4.6 Nilai Komponen Perubahan Inventori ADHB 2014 - 2018 (Miliar Rupiah)**

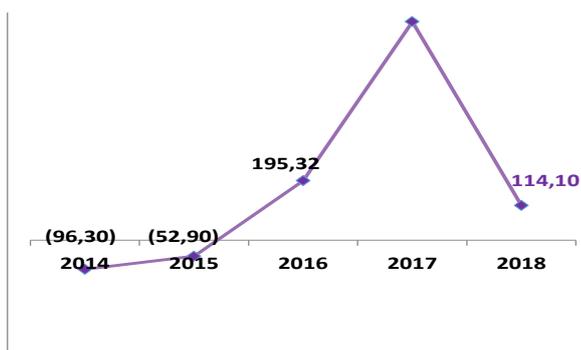


#### 4.6 Ekspor Luar Negeri

Komponen Ekspor Luar Negeri merupakan barang dan jasa yang berasal dari Maluku Utara dan diekspor ke luar negeri. Komponen Ekspor Luar Negeri menunjukkan perkembangan yang fantastis dalam dua tahun terakhir, atau bisa dikatakan berkembang dari peranan yang kecil menjadi cukup besar yang ditunjukkan pada kontribusi terhadap perekonomian Maluku Utara yang mencapai dua digit yaitu 11,29 persen pada tahun 2017 dan naik hingga 27,45 persen pada 2018. Pertumbuhan tahun 2018 sedikit melambat yaitu sebesar 114,10 persen dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya.

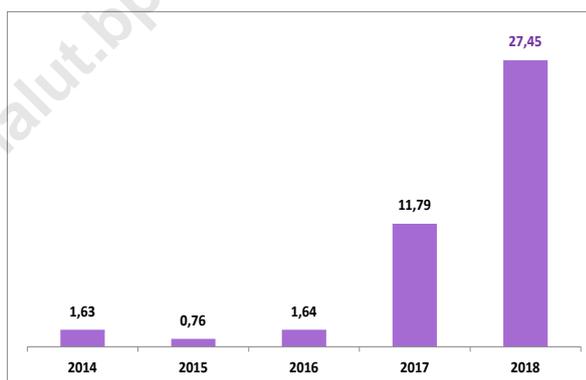
Pertumbuhan komponen ini dikarenakan menggiatnya kembali sektor Pertambangan dan industri pengolahan barang tambang yang mendorong pertumbuhan ekspor luar negeri yang

**Gambar 4.7 Pertumbuhan Komponen Ekspor Luar Negeri 2014 - 2018 (%)**



antara lain disebabkan oleh telah dibukanya “keran” ekspor beberapa komoditas mineral mentah (bijih nikel) dengan kadar tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 setelah pada tahun 2014 mengalami resesi seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk mengolah hasil tambangnya di dalam negeri sebelum diekspor. Seperti diketahui bahwa Ekspor barang dari Maluku ke luar negeri pada tahun 2018 lebih dari 99 persen adalah barang tambang nikel dan turunannya. Selain itu seiring dengan telah beroperasinya sebagian smelter nikel juga turut mendorong pertumbuhan ekspor luar negeri.

**Gambar 4.8 Perkembangan Peranan Komponen Ekspor LN 2014 - 2018 (%)**

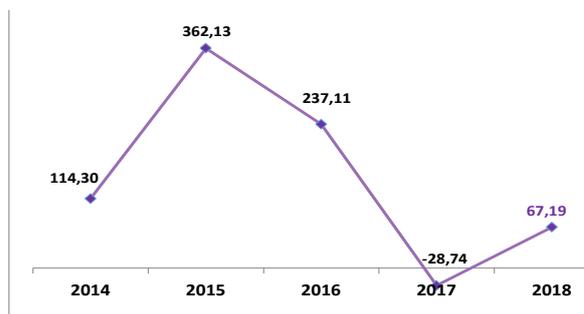


Penghitungan komponen Ekspor Luar Negeri pada tingkat provinsi dapat dirinci menjadi dua subkomponen, yaitu subkomponen Barang dan Jasa. Subkomponen yang memberikan peranan terbesar tentu saja subkomponen Barang sesuai dengan komoditas ekspor yang sebagian besar adalah barang tambang nikel dan turunannya yang mencapai 27,15 persen. Sedangkan subkomponen Jasa antara lain mencakup pengeluaran wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Maluku Utara yang memiliki peranan masih kecil terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu hanya sebesar 0,30 persen.

#### 4.7 Impor Luar Negeri

Komponen Impor Luar Negeri berupa barang dan jasa yang berasal dari luar negeri dan diimpor ke Maluku Utara. Komponen Impor Luar Negeri merupakan pengurang di dalam perekonomian yang menunjukkan bahwa semakin kecil nilai komponen ini maka perekonomian akan semakin tinggi dengan asumsi komponen lainnya konstan.

**Gambar 4.9 Pertumbuhan Komponen Impor Luar Negeri 2014 - 2018 (%)**



Komponen Impor Luar Negeri pada tahun 2018 tumbuh positif sebesar 67,19 persen. Tumbuhnya komponen Impor Luar Negeri tak lepas dari meningkatnya impor barang modal seperti mesin mekanik. Mesin ini diduga merupakan mesin yang digunakan untuk membangun smelter pengolahan bijih nikel di Maluku Utara. Peranan komponen Impor Luar Negeri terhadap perekonomian Maluku Utara tahun 2018 sebesar 11,57 persen.

Penghitungan komponen Impor Luar Negeri pada tingkat provinsi dapat dirinci menjadi dua subkomponen, yaitu subkomponen Barang dan Jasa. Subkomponen yang memberikan peranan terbesar adalah subkomponen Barang sebesar 11,42 persen. Sedangkan subkomponen Jasa antara lain mencakup pengeluaran penduduk Maluku Utara di luar negeri, seperti jamaah haji dari Maluku Utara, memiliki peranan masih kecil terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu hanya sebesar 0,14 persen.

#### 4.8 Net Ekspor Antar Daerah

Komponen Net Ekspor Antar Daerah merupakan nilai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Definisi antar daerah disini adalah antar provinsi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komponen Net Ekspor Antar Daerah dapat berupa barang dan jasa yang berasal dari dalam atau luar Maluku Utara. Komponen Net Ekspor Antar Daerah dapat bernilai positif atau negatif. Komponen ini bernilai positif menunjukkan bahwa nilai ekspor antar daerah lebih besar dibandingkan nilai impor antar daerah. Begitu juga sebaliknya, apabila komponen ini bernilai negatif menunjukkan bahwa nilai ekspor antar daerah lebih kecil dibandingkan nilai impor antar daerah

Nilai komponen Net Ekspor Antar Daerah selalu bernilai negatif dalam jangka waktu lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa nilai ekspor antar daerah Maluku Utara lebih kecil dari nilai impor antar daerah Maluku Utara, atau dapat dikatakan bahwa Maluku Utara dalam memenuhi kebutuhan di dalam wilayahnya masih bergantung pada impor dari daerah lainnya.

**Gambar 4.10 Pertumbuhan Komponen Impor Luar Negeri 2014 - 2018 (%)**



Pada tahun 2018, Komponen Net Ekspor Antar Daerah memiliki peranan yang cukup tinggi, yaitu mencapai -35,47 persen. Dilihat dari laju pertumbuhan, komponen ini pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu mencapai -55,91 persen

jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar -157,97, laju pertumbuhan komponen Net Ekspor di tahun ini menunjukkan bahwa ketergantungan Maluku Utara terhadap barang impor semakin menurun.

Penghitungan komponen Net Ekspor Antar Daerah pada tingkat provinsi dapat dirinci menjadi dua subkomponen, yaitu subkomponen Ekspor Antar Daerah dan Impor Antar Daerah. Subkomponen yang memberikan peranan terbesar pada tahun 2018 adalah subkomponen Impor Antar Daerah mencapai -95,40 persen. Peranan berlawanan negatif menunjukkan bahwa subkomponen ini merupakan pengurang di dalam perekonomian Maluku Utara. Dilihat dari laju pertumbuhan, subkomponen Impor Antar Daerah pada tahun 2018 tumbuh sebesar 2,16 persen, cukup menggembirakan karena menunjukkan bahwa ketergantungan Maluku Utara terhadap barang impor semakin melambat.

<https://malut.bps.go.id>

# L

## LAMPIRAN

<https://malut.bps.go.id>





**Lampiran 1 PDRB Maluku Utara Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran 2014 - 2018  
(Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>13 957,15</b>	<b>15 464,57</b>	<b>16 943,24</b>	<b>18 359,62</b>	<b>19 996,62</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	6 121,04	6 711,41	7 359,77	7 980,98	8 560,87
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	1 136,11	1 274,23	1 448,45	1 612,36	1 770,67
1.c. Pakaian	701,73	789,7	859,83	918,17	994,14
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	893,45	1 012,14	1 118,25	1 217,93	1 363,4
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	371,69	402,57	427,98	446,43	481,43
1.f. Kesehatan	699,68	783,26	840,52	895,99	972,44
1.g. Transportasi/Angkutan	1 148,45	1 267,57	1 345,33	1 458,23	1 654,24
1.h. Komunikasi	800,4	852,39	942,14	1 018,12	1 132,7
1.i. Rekreasi dan Budaya	627,06	687,09	755,57	799,55	850,55
1.j. Pendidikan	330,21	367,34	417,05	456,97	475,88
1.k. Penginapan dan Hotel	519,95	582,87	630,82	703,14	805,57
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	607,4	733,99	797,54	851,75	934,72
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>287,72</b>	<b>320,93</b>	<b>346,77</b>	<b>383,53</b>	<b>459,18</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>7 965,61</b>	<b>8 856,58</b>	<b>9 222,78</b>	<b>10 235,8</b>	<b>11 395,14</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	6 386,7	7 017,51	6 838,73	7 409,83	8 129,93
3.b. Konsumsi Individu	1 578,91	1 839,07	2 384,04	2 825,97	3 265,21
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>6 210,62</b>	<b>7 245,51</b>	<b>8 355,63</b>	<b>9 677,28</b>	<b>11 455,01</b>
4.a. Bangunan	3 321,83	3 913,15	4 388,62	5 063,88	5 878,17
4.b. Non-Bangunan	2 888,78	3 332,36	3 967,01	4 613,4	5 576,83
5. Perubahan Inventori	- 227,97	- 370,99	247,09	- 522,48	340,15
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>390,86</b>	<b>203,25</b>	<b>478,84</b>	<b>3 804,2</b>	<b>10 019,89</b>
6.a. Barang	357,9	162,24	433,32	3 741,45	9 909,1
6.b. Jasa	32,96	41,01	45,52	62,75	110,79
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>186,58</b>	<b>897,86</b>	<b>2 638,51</b>	<b>2 042,61</b>	<b>4 221,11</b>
7.a. Barang	141,59	839,92	2 573,85	1 968,3	4 168,89
7.b. Jasa	44,99	57,93	64,66	74,31	52,22
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>- 4 355,34</b>	<b>- 4 183,68</b>	<b>- 3 805,24</b>	<b>- 7 622,76</b>	<b>-12 947,23</b>
8.a. Ekspor	11 690,86	16 557,12	19 957,02	21 898,27	21 872,49
8.b. Impor	16 046,19	20 740,8	23 762,26	29 521,03	34 819,71
<b>P D R B</b>	<b>24 042,08</b>	<b>26 638,3</b>	<b>29 150,6</b>	<b>32 272,57</b>	<b>36 497,64</b>

**Lampiran 2 PDRB Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran 2014 - 2018  
(Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>11.510,35</b>	<b>11.910,96</b>	<b>12.529,73</b>	<b>13.169,87</b>	<b>13.747,25</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	5.359,52	5.453,45	5.726,11	6.006,84	6.194,82
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	895,61	935,19	982,15	1.017,69	1.020,63
1.c. Pakaian	528,15	553,50	577,88	605,37	632,12
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	676,71	727,31	760,67	806,16	885,61
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	270,13	280,10	292,49	303,57	319,47
1.f. Kesehatan	571,32	592,14	622,00	653,39	703,24
1.g. Transportasi/Angkutan	935,81	973,14	1.025,59	1.080,82	1.165,98
1.h. Komunikasi	626,55	667,59	711,45	758,64	824,04
1.i. Rekreasi dan Budaya	517,51	544,26	581,91	606,23	611,21
1.j. Pendidikan	268,11	279,80	298,32	314,88	316,55
1.k. Penginapan dan Hotel	392,90	411,80	435,00	476,57	511,12
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	468,02	492,66	516,17	539,69	562,46
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>239,56</b>	<b>249,12</b>	<b>261,92</b>	<b>282,84</b>	<b>322,66</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>6.014,05</b>	<b>6.355,94</b>	<b>6.428,67</b>	<b>6.865,64</b>	<b>7.142,08</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	4.832,71	5.049,50	4.780,99	4.971,19	5.114,18
3.b. Konsumsi Individu	1.181,34	1.306,44	1.647,68	1.894,45	2.027,90
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>5.251,23</b>	<b>5.786,40</b>	<b>6.414,64</b>	<b>7.158,02</b>	<b>7.923,13</b>
4.a. Bangunan	2.751,13	3.068,94	3.387,29	3.889,36	4.385,21
4.b. Non-Bangunan	2.500,10	2.717,46	3.027,35	3.268,65	3.537,92
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>(183,67)</b>	<b>(234,61)</b>	<b>165,50</b>	<b>(325,52)</b>	<b>191,90</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>311,03</b>	<b>146,49</b>	<b>432,63</b>	<b>3.540,98</b>	<b>7.581,11</b>
6.a. Barang	286,14	118,45	400,76	3.496,30	7.510,68
6.b. Jasa	24,90	28,04	31,86	44,67	70,43
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>155,22</b>	<b>717,31</b>	<b>2.418,13</b>	<b>1.723,06</b>	<b>2.880,81</b>
7.a. Barang	123,60	681,36	2.372,34	1.668,05	2.844,28
7.b. Jasa	31,61	35,95	45,79	55,00	36,52
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>(3.778,57)</b>	<b>(3.116,70)</b>	<b>(2.258,26)</b>	<b>(5.757,88)</b>	<b>-8.977,21</b>
8.a. Ekspor	12.178,77	17.170,69	19.241,20	19.717,46	17.047,87
8.b. Imp	15.957,34	20.287,39	21.499,46	25.475,34	26.025,08
<b>P D R B</b>	<b>19.208,76</b>	<b>20.380,30</b>	<b>21.556,68</b>	<b>23.210,86</b>	<b>25.050,12</b>

**Lampiran 3 Laju Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan  
menurut Pengeluaran 2014 - 2018 (%)**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>3,88</b>	<b>3,48</b>	<b>5,19</b>	<b>5,11</b>	<b>4,38</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	1,61	1,75	5,00	4,90	3,13
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	4,86	4,42	5,02	3,62	0,29
1.c. Pakaian	6,47	4,80	4,40	4,76	4,42
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	7,79	7,48	4,59	5,98	9,85
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	5,71	3,69	4,42	3,79	5,24
1.f. Kesehatan	5,53	3,65	5,04	5,05	7,63
1.g. Transportasi/Angkutan	5,10	3,99	5,39	5,39	7,88
1.h. Komunikasi	8,29	6,55	6,57	6,63	8,62
1.i. Rekreasi dan Budaya	6,17	5,17	6,92	4,18	0,82
1.j. Pendidikan	6,35	4,36	6,62	5,55	0,53
1.k. Penginapan dan Hotel	3,08	4,81	5,63	9,56	7,25
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	6,15	5,26	4,77	4,56	4,22
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>10,83</b>	<b>3,99</b>	<b>5,14</b>	<b>7,98</b>	<b>14,08</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>7,03</b>	<b>5,68</b>	<b>1,14</b>	<b>6,80</b>	<b>4,03</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	8,01	4,49	-5,32	3,98	2,88
3.b. Konsumsi Individu	3,19	10,59	26,12	14,98	7,04
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>4,47</b>	<b>10,19</b>	<b>10,86</b>	<b>11,59</b>	<b>10,69</b>
4.a. Bangunan	5,65	11,55	10,37	14,82	12,75
4.b. Non-Bangunan	3,20	8,69	11,40	7,97	8,24
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>81,30</b>	<b>-27,73</b>	<b>170,54</b>	<b>-296,69</b>	<b>158,95</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>-96,30</b>	<b>-52,90</b>	<b>195,32</b>	<b>718,48</b>	<b>114,10</b>
6.a. Barang	-96,59	-58,60	238,33	772,41	114,82
6.b. Jasa	-7,38	12,63	13,63	40,20	57,66
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>114,30</b>	<b>362,13</b>	<b>237,11</b>	<b>-28,74</b>	<b>67,19</b>
7.a. Barang	214,55	451,25	248,18	-29,69	70,52
7.b. Jasa	-4,59	13,72	27,36	20,13	-33,60
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>65,94</b>	<b>17,52</b>	<b>27,54</b>	<b>-154,97</b>	<b>-55,91</b>
8.a. Ekspor	361,01	40,99	12,06	2,48	-13,54
8.b. Impor	16,18	27,14	5,97	18,49	2,16
<b>P D R B</b>	<b>5,49</b>	<b>6,10</b>	<b>5,77</b>	<b>7,67</b>	<b>7,92</b>

Lampiran 4 Indeks Implisit PDRB Maluku Utara menurut Pengeluaran 2014 - 2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>121,26</b>	<b>129,83</b>	<b>135,22</b>	<b>139,41</b>	<b>145,46</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	114,21	123,07	128,53	132,86	138,19
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	126,85	136,25	147,48	158,43	173,49
1.c. Pakaian	132,86	142,67	148,79	151,67	157,27
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	132,03	139,16	147,01	151,08	153,95
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	137,59	143,72	146,32	147,06	150,7
1.f. Kesehatan	122,47	132,28	135,13	137,13	138,28
1.g. Transportasi/Angkutan	122,72	130,26	131,18	134,92	141,88
1.h. Komunikasi	127,75	127,68	132,43	134,20	137,46
1.i. Rekreasi dan Budaya	121,17	126,24	129,84	131,89	139,16
1.j. Pendidikan	123,16	131,29	139,80	145,12	150,33
1.k. Penginapan dan Hotel	132,33	141,54	145,02	147,54	157,61
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	129,78	148,99	154,51	157,82	166,18
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPR</b>	<b>120,10</b>	<b>128,82</b>	<b>132,39</b>	<b>135,60</b>	<b>142,31</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>132,45</b>	<b>139,34</b>	<b>143,46</b>	<b>149,09</b>	<b>159,55</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	132,16	138,97	143,04	149,06	158,97
3.b. Konsumsi Individu	133,65	140,77	144,69	149,17	161,01
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>118,27</b>	<b>125,22</b>	<b>130,26</b>	<b>135,20</b>	<b>144,58</b>
4.a. Bangunan	120,74	127,51	129,56	130,20	134,05
4.b. Non-Bangunan	115,55	122,63	131,04	141,14	157,63
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>124,12</b>	<b>158,13</b>	<b>149,30</b>	<b>160,51</b>	<b>177,25</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>125,67</b>	<b>138,74</b>	<b>110,68</b>	<b>107,43</b>	<b>132,17</b>
6.a. Barang	125,08	136,97	108,12	107,01	131,93
6.b. Jasa	132,38	146,23	142,87	140,47	157,31
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>120,20</b>	<b>125,17</b>	<b>109,11</b>	<b>118,55</b>	<b>146,53</b>
7.a. Barang	114,55	123,27	108,49	118,00	146,57
7.b. Jasa	142,31	161,14	141,22	135,10	142,97
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>115,26</b>	<b>134,23</b>	<b>168,50</b>	<b>132,39</b>	<b>144,22</b>
8.a. Ekspor	95,99	96,43	103,72	111,06	128,3
8.b. Impor	100,56	102,23	110,52	115,88	133,79
<b>P D R B</b>	<b>125,16</b>	<b>130,71</b>	<b>135,23</b>	<b>139,04</b>	<b>145,70</b>

**Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Maluku Utara  
menurut Pengeluaran 2014 - 2018 (%)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>5,38</b>	<b>7,07</b>	<b>4,15</b>	<b>3,09</b>	<b>4,34</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	2,79	7,76	4,44	3,37	4,01
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	7,47	7,41	8,24	7,43	9,50
1.c. Pakaian	7,80	7,38	4,29	1,94	3,69
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	5,90	5,40	5,64	2,77	1,90
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	7,96	4,45	1,81	0,50	2,47
1.f. Kesehatan	7,41	8,01	2,16	1,48	,84
1.g. Transportasi/Angkutan	7,76	6,14	0,71	2,85	5,16
1.h. Komunikasi	3,87	-0,05	3,72	1,34	2,42
1.i. Rekreasi dan Budaya	6,21	4,19	2,85	1,58	5,51
1.j. Pendidikan	8,39	6,60	6,48	3,81	3,59
1.k. Penginapan dan Hotel	8,32	6,96	2,45	1,74	6,82
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	12,33	14,80	3,71	2,14	5,30
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>5,08</b>	<b>7,26</b>	<b>2,77</b>	<b>2,42</b>	<b>4,95</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>7,81</b>	<b>5,20</b>	<b>2,96</b>	<b>3,92</b>	<b>7,02</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	7,68	5,16	2,93	4,21	6,65
3.b. Konsumsi Individu	8,36	5,32	2,79	3,10	7,94
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>6,66</b>	<b>5,87</b>	<b>4,03</b>	<b>3,79</b>	<b>6,94</b>
4.a. Bangunan	4,18	5,60	1,61	0,49	2,95
4.b. Non-Bangunan	9,53	6,13	6,86	7,71	11,68
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>425,92</b>	<b>27,40</b>	<b>-5,59</b>	<b>7,51</b>	<b>10,43</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>32,31</b>	<b>10,41</b>	<b>-20,22</b>	<b>-2,94</b>	<b>23,02</b>
6.a. Barang	31,81	9,50	-21,06	-1,03	23,29
6.b. Jasa	10,99	10,46	-2,29	-1,68	11,98
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>-6,88</b>	<b>4,13</b>	<b>-12,83</b>	<b>8,64</b>	<b>23,60</b>
7.a. Barang	-14,52	7,62	-11,99	8,76	24,21
7.b. Jasa	15,48	13,23	-12,36	-4,34	5,82
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>3,91</b>	<b>16,46</b>	<b>25,53</b>	<b>-21,43</b>	<b>8,94</b>
8.a. Ekspor	17,91	0,45	7,56	7,08	15,52
8.b. Impor	-4,46	1,67	8,11	4,85	15,46
<b>P D R B</b>	<b>6,30</b>	<b>4,43</b>	<b>3,46</b>	<b>2,82</b>	<b>4,79</b>

**Lampiran 6 Sumber Pertumbuhan PDRB Maluku Utara menurut Pengeluaran 2014 - 2018**  
(%)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>2,36</b>	<b>2,09</b>	<b>3,04</b>	<b>2,97</b>	<b>2,49</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	0,47	0,49	1,34	1,30	0,81
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	0,23	0,21	0,23	0,16	0,01
1.c. Pakaian	0,18	0,13	0,12	0,13	0,12
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	0,27	0,26	0,16	0,21	0,34
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	0,08	0,05	0,06	0,05	0,07
1.f. Kesehatan	0,16	0,11	0,15	0,15	0,21
1.g. Transportasi/Angkutan	0,25	0,19	0,26	0,26	0,37
1.h. Komunikasi	0,26	0,21	0,22	0,22	0,28
1.i. Rekreasi dan Budaya	0,17	0,14	0,18	0,11	0,02
1.j. Pendidikan	0,09	0,06	0,09	0,08	0,01
1.k. Penginapan dan Hotel	0,06	0,10	0,11	0,19	0,15
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>0,13</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,10</b>	<b>0,17</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>2,17</b>	<b>1,78</b>	<b>0,36</b>	<b>2,03</b>	<b>1,19</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	1,97	1,13	(1,32)	0,88	0,62
3.b. Konsumsi Individu	0,20	0,65	1,67	1,14	0,57
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>1,23</b>	<b>2,79</b>	<b>3,08</b>	<b>3,45</b>	<b>3,30</b>
4.a. Bangunan	0,81	1,65	1,56	2,33	2,14
4.b. Non-Bangunan	0,43	1,13	1,52	1,12	1,16
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>4,39</b>	<b>(0,27)</b>	<b>1,96</b>	<b>(2,28)</b>	<b>2,23</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>(44,51)</b>	<b>(0,86)</b>	<b>1,40</b>	<b>14,42</b>	<b>17,41</b>
6.a. Barang	(44,50)	(0,87)	1,39	14,36	17,30
6.b. Jasa	(0,01)	0,02	0,02	0,06	0,11
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>0,45</b>	<b>2,93</b>	<b>8,35</b>	<b>(3,22)</b>	<b>4,99</b>
7.a. Barang	0,46	2,90	8,30	(3,27)	5,07
7.b. Jasa	(0,01)	0,02	0,05	0,04	-0,08
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>40,17</b>	<b>3,45</b>	<b>4,21</b>	<b>(16,23)</b>	<b>-13,87</b>
8.a. Ekspor	52,38	25,99	10,16	2,21	-11,50
8.b. Impor	12,20	22,54	5,95	18,44	2,37
<b>P D R B</b>	<b>5,49</b>	<b>6,10</b>	<b>5,77</b>	<b>7,67</b>	<b>7,92</b>

**Lampiran 7 Peranan Komponen PDRB Maluku Utara  
menurut Pengeluaran 2014 - 2018 (%)**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>58,05</b>	<b>58,05</b>	<b>58,12</b>	<b>56,89</b>	<b>54,79</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	25,46	25,19	25,25	24,73	23,46
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	4,73	4,78	4,97	5,00	4,85
1.c. Pakaian	2,92	2,96	2,95	2,85	2,72
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	3,72	3,80	3,84	3,77	3,74
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	1,55	1,51	1,47	1,38	1,32
1.f. Kesehatan	2,91	2,94	2,88	2,78	2,66
1.g. Transportasi/Angkutan	4,78	4,76	4,62	4,52	4,53
1.h. Komunikasi	3,33	3,20	3,23	3,15	3,10
1.i. Rekreasi dan Budaya	2,61	2,58	2,59	2,48	2,33
1.j. Pendidikan	1,37	1,38	1,43	1,42	1,30
1.k. Penginapan dan Hotel	2,16	2,19	2,16	2,18	2,21
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	2,53	2,76	2,74	2,64	2,56
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	<b>1,26</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>33,13</b>	<b>33,25</b>	<b>31,64</b>	<b>31,72</b>	<b>31,22</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	26,56	26,34	23,46	22,96	22,28
3.b. Konsumsi Individu	6,57	6,90	8,18	8,76	8,95
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>25,83</b>	<b>27,20</b>	<b>28,66</b>	<b>29,99</b>	<b>31,39</b>
4.a. Bangunan	13,82	14,69	15,05	15,69	16,11
4.b. Non-Bangunan	12,02	12,51	13,61	14,30	15,28
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>-0,95</b>	<b>-1,39</b>	<b>0,85</b>	<b>-1,62</b>	<b>0,93</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>1,63</b>	<b>0,76</b>	<b>1,64</b>	<b>11,79</b>	<b>27,45</b>
6.a. Barang	1,49	0,61	1,49	11,59	27,15
6.b. Jasa	0,14	0,15	0,16	0,19	0,30
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>0,78</b>	<b>3,37</b>	<b>9,05</b>	<b>6,33</b>	<b>11,57</b>
7.a. Barang	0,59	3,15	8,83	6,10	11,42
7.b. Jasa	0,19	0,22	0,22	0,23	0,14
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>-18,12</b>	<b>-15,71</b>	<b>-13,05</b>	<b>-23,62</b>	<b>-35,47</b>
8.a. Ekspor	48,63	62,16	68,46	67,85	59,93
8.b. Impor	66,74	77,86	81,52	91,47	95,40
<b>P D R B</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>





# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Stadion No. 65, Ternate 97712  
Telp. (0921) 3127878; Fax. (0921) 3126301  
homepage: <http://malut.bps.go.id> ; email: [bps8200@bps.go.id](mailto:bps8200@bps.go.id)

